

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PENYIDIKAN**
(Studi Kasus Pencurian Di Kepolisian Resort Bulukumba).



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

ADRIANTO

NIM.10600106016

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MOTO

Perasaan takut gagal akan mematahkan sayap kesuksesan sebelum ia terbang. Ibarat anak elang yang takut akan ketinggian padahal, ia adalah calon penguasa angkasa. Keperkasaannya tertutupi oleh perasaan takut yang tidak beralasan.

Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan ia beriman, niscaya kami hidupan dia dengan kehidupan yang baik; dan kami balasi mereka dengan pahala yang terlebih baik dari apa yang mereka amalkan. (surat An Nahl ayat 96-97).



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi kasus Pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba)”, ini adalah benar-benar hasil karya sendiri. Dan jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 20 Desember 2010

Penyusun

ADRIANTO



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi kasus Pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba)” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Sembah sujud kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, pembimbing hidupku, Ayahanda **Jafar.N** dan ibunda **Nurhayati**, atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kau berikan sejak kecil sampai saat ini, doa semangat serta kerja kerasmu yang membuat penulis bias melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dengan rasa bangga dan haruh saya ucapkan terima kasih kepada saudara(i) saya tercinta, Adiku **Dwi siswanti**, **Agus saputra**, dan **Muh. Alkuadri.**, atas segala dukungan, baik kepada penulis

selama melakukan studi dan keluarga besar yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Oleh karena itu melalui tulisan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Prof.Dr.H.Azhar Arsyad, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Hamsir, SH.M.Hum dan Istiqamah, SH.MH masing-masing Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum. Dr. Kasjim Salendra, S.H.M.Th.I dan Abdul Rahman, S.ag, M.Pd selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Aparat kepolisian yang telah membantu serta semua pihak yang telah memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 06 (Syamsurianto, Awaludin A. Astriyanti Pratiwi, Muflih, Achmad Faisal, A. kurdian Prima, Muh.Syakir, Muh. Ardiansyah, Syafaruddin jamil, Husam, Alam Syahri) .
7. Sahabat Seperjuangan yang sudah menjadi saudaraku (Rahmat, Adi, mas'ud). yang mau berbagi suka duka, canda tawa.
8. Para kaum hawa (Nisa, Rini, Ratih, Ika, leliya). yang sering memberikan semangat serta selalu memberikan ekspresi yang biasa membuat penulis bingung dan selalu bertanya-tanya dengan keadaan kalian.

Semoga bantuan, bimbingan, dukungan maupun pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan semoga tulisan ini bermanfaat adanya. Amin.

Makassar September

2010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
 BAB. I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi dan Ruang Lingkup Pembahasan	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
 BAB. II Gambaran Umum Mengenai Penyidikan	 15
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	15
B. Pemeriksaan pada Proses Penyidikan	18
C. Pemeriksaan Saksi-saksi pada Proses Penyidikan	20
D. Penyitaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan	27
 BAB. III Tinjauan Umum Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah	 43
A. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah	43
B. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah	44
C. Prinsip-Prinsip Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah	46

D. Pentingnya Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan	51
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
B. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba	60
C. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Resort Bulukumba	70
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Nama : ADRIANTO
Nim : 10600106016
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan : Studi Kasus Pencurian Di Kepolisian Resort Bulukumba.

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: (1) Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada kepolisian dalam kasus pencurian; dan (2) Faktor-faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian.

Jenis penelitian adalah penelitian survei. Sumber data adalah beberapa informan kunci yang terdiri dari 2 (Dua) orang penyidik kepolisian, 3 (Tiga) orang Tersangka yang terlibat tindak pidana yang penarikannya dilakukan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara, studi dokumentasi, serta penelusuran terhadap undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian diuraikan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada kepolisian dalam kasus pencurian telah diterapkan hanya saja kasus yang timbul hanyalah bersifat kasuistik dan oleh karena harus di tindak tegas agar tidak terjadi lagi. Faktor pendukung dan penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di kepolisian resort Bulukumba, Faktor pendukung (1) subttansi hukum; (2) factor Intruksi dari atasan; (3) Faktor petugas penyidik; (4) dukungan dari lembaga suwadaya masyarakat; (5) faktor Budaya. Faktor Penghambat (1) Faktor sturuktural; (2) kurang optimalnya profesionalita dan keahlian polisi; (3) oknum aparat; (4) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asas praduga tak bersalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)¹. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Saat ini Republik Indonesia telah berada pada era reformasi, masa yang menginginkan sebuah perubahan di semua sendi kehidupan masyarakat. Salah satu dari agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus-kasus hukum oleh aparat penegak hukum terkadang menimbulkan

¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publising, 2005), h.1

sejumlah persoalan/masalah yang tidak terselesaikan sehingga menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang².

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya³. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada. Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Akibatnya tingkah laku dan nilai-nilai yang mendasar lenyap dan berganti sebuah nilai baru yang merupakan produk dari luar yaitu nilai kebebasan, sehingga mendorong para pelaku kejahatan melakukan aksinya.

Adanya warga Negara yang tidak menjunjung hukum, warga Negara yang salah/keliru menghayati hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan “pelanggaran hukum”. Anggapan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak tepat jika orang tersebut secara cermat dan teliti belum diketahui tentang kebenaran anggapan tersebut karena adanya asas praduga tak bersalah”(*presumption of innocence*)⁴.

² *Ibid.*

³ Topo Santoso, <http://www.legalitas.Org>. 11 Juni 2010

⁴ Romli Atmasasmita, <http://www.legalitas.Org> Kamis 16 November 2006

Petugas kepolisian sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan selanjutnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah di dalam sistem peradilan pidana ini menempatkan kedudukan polisi sebagai *“gate keeper in the process”*.⁵

Kadri Husin mengemukakan bahwa :

“Berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa itu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tidak mau” wewenang kepolisian atau *“police discretion”* lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenangnya.⁶

Proses penyidikan di tingkat kepolisian, Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana karena prinsip ini menjamin hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 21

⁶ Lihat Kadri Husain dalam M. Faal, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP* (tesis), (Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I., 1987), h 93

Penjelasan umum KUHP dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 berbunyi bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”⁷.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari hakim pengadilan, ia tetap masih memiliki hak-hak individu sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimilikinya itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik⁸.

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “*prinsip ankuisator*”. Prinsip *ankuisiator* menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek atau sebagai obyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan sebagai obyek pemeriksaan dalam prinsip *ankuisiator* adalah

⁷ Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 *Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

⁸ Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2005), h.200

prinsip dimana terdakwa/tersangka diposisikan sebagai arah pemeriksaan itu ditujukan⁹.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti termotivasi untuk menganalisis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di kepolisian Resot Bulukumba mengingat penerapan asas tersebut di lokasi penelitian berdasarkan temuan pada penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 terhadap 2 orang tersangka yang kasusnya masih dalam proses penyidikan polisi, bahwa penerapannya kadangkala (seolah-olah) telah memandang tersangka/terdakwa sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Bulukumba?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Bulukumba?

C. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis berarti sesuatu yang masih kurang untuk sebuah kesimpulan pendapat, dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan,

⁹ Lihat dalam M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jilid I dan II; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 40.

tetapi kesimpulan ini belum final, masih perlu penelitian selanjutnya untuk membuktikan kebenarannya.

1. Penerapan asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba belum berjalan sesuai ketentuan dalam KUHP. Hal ini terbukti dari penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 terhadap 2 orang tersangka yang kasusnya masih dalam proses penyidikan polisi, dimana penyidik sering memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah di lingkungan Kepolisian Resort Bulukumba antara lain belum adanya pemahaman yang komprehensif dari para penyidik, kurangnya saran dan prasarana penyidikan.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami makna yang dimaksudkan dalam skripsi ini, maka perlu diberikan definisi secara operasional mengenai judulnya, yaitu:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Penerapan” memiliki arti Peroses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁰

Kata “Asas” memiliki arti hukum dasar; dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau pendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)¹¹.

Pengertian asas praduga tak bersalah dapat kita jumpai Dalam Pasal 8 undang-undang nomor 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”¹².

Penyidikan; adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Toha Putra, 2008). h.1689

¹¹ *Ibid.*, h. 94

¹² Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹³ Pasal 1 angka 2 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

E. Kajian Pustaka

Skripsi ini membahas tentang mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba. Pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini secara substansial sudah banyak dikaji oleh penulis-penulis dan para pakar- pakar hukum sebelumnya akan tetapi pembahasannya lebih banyak dibahas dalam acara-acara yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Sehingga dalam tataran intensional penulisan belum mampu menghadirkan pemahaman wacana yang akurat dan holistik. Oleh karena itulah maka pembahasan ini didasarkan pada literatur yang telah ada, dengan menekankan pembahasan yang lebih mudah untuk dipahami.

Adapun literatur-literatur yang penulis gunakan sebagai pedoman utama dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan), karangan Dr. Leden Marpaung, dalam bukunya membahas tentang ruang lingkup proses penanganan perkara pidana, yang membahas secara sfesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penanganan perkara pidana; penyelidikan dan penyidikan; pembuktian; tersangka/terdakwa, yang ditangani aparat penegak hukum, dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok

kekuasaan kehakiman salah satu adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (presumption of innocence).

2. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, penulis Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H dalam bukunya membahas tentang proses hukum yang adil menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dijunjung tinggi, dijamin dan dilindungi, proses hukum yang adil tidak hanya merupakan hak istimewa tersangka/terdakwa saja, melainkan juga merupakan jaminan bahwa penegakan hukum harus taat dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana, karangan Harun M. Husein, SH. Dalam bukunya membahas tentang , dalam praktek masih banyak permasalahan-permasalahan penyidikan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dalam hubungannya dengan penuntutan. Permasalahan-permasalahna tersebut, perlu dicarikan upaya penaggulangan, guna menghindari terjadinya penangan dan penyelesaian perkara yang berlarut-larut.
4. Hukum Acara Pidana Indonesia, karangan Prof. Dr. Jur. Andi hamzah dalam bukunya membahas. Tentang ruang lingkup hukum acara pidana secara.

5. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, karangan M. Yahya Harahap, S.H.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beserta penjelasannya sebagai pedoman untuk memahami tata cara penyidikan.

Buku-buku tersebut diatas hanya membahas secara umum tidak spesipik membahas apa yang akan di bahas oleh skripsi ini, skripsi ini membahas masalah asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Studi Kasus Pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan sampel.

Populasi adalah seluruh obyek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang di teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah para penyidik kepolisian Resort Bulukumba serta para terdakwa/tersangka yang kasusnya sementara dalam peroses penyidikan di Kepolisia Resort bulukumba yaitu 21 orang.

Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang akan diamati. Sebagai wakil dari populasi sampel harus benar-benar reprenstatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sampel

yang akan diambil sebanyak 2 orang penyidik kepolisian. Sedangkan sampel dari para terdakwa/tersangka diambil sebanyak 3 orang saja yang penentuannya dilakukan secara purposive sampling (penentuan dengan secara sengaja terhadap populasi yang dianggap representatif memberikan informasi yang dibutuhkan dan sangat membangun penelitian ini). Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bahwa tersangka/terdakwa relative homogeny, baik tingkat pendidikannya maupun pemahamannya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah.

2. Metode pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan yuridis ; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan asas praduga tak bersalah dengan praktik atau penerapannya di Kepolisian Resort Bulukumba.
- b. Pendekatan sosiologis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat adanya pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dengan penegakan hukum, begitupun sebaliknya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman masyarakat (terdakwa/terpidana) terhadap hukum dengan perilaku hukum mereka. Begitupun sebaliknya, apakah terdapat pengaruh institusi dan hubungan-hubungan social terhadap penegakan hukum itu sendiri.

3. Teknik pengumpulan data.

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data relevan dan membangun penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara; penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting sebagai data sekunder, yang langsung berhubungan dengan penerapan asas praduga tak bersalah, baik terhadap informan dari pihak penyidik maupun terhadap terdakwa/tersangka yang kasusnya masih dalam proses penyidikan.
- b. Dokumentasi; yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, baik buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang di Kantor Kepolisian Resort Bulukumba.

4. Teknik pengolahan dan analisis data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam mengelolah hasil penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data hasil penelitian secara rinci, baik secara deduktif maupun induktif. Data kuantitatif juga dibutuhkan dalam penelitian ini seperti jumlah kasus pencurian yang sedang ditangani/disidik di Kepolisian Resort Bulukumba, jumlah tersangka/terdakwa, akan tetapi data tersebut tidak untuk dianalisis dengan menggunakan rumus statistic. Hal-hal yang dideskripsikan tersebut antara lain:

- 1 Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian dalam kasus pencurian.
- 2 Faktor-faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian.

G. Tujuan dan Kegunaan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba, khususnya dalam kasus pencurian.
 - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah di Kepolisian Resort Bulukumba dalam kasus pencurian.
2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a) Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas praduga tak bersalah serta hal-hal yang

berhubungan dengannya, termasuk hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaannya.

- b) Diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan sebagai bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.
- c) Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan asas praduga tak bersalah serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1. Penyidik.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi pelanggaran hukum, untuk melakukan pemeriksaan permulaan.¹

Aparat penyidik berdasarkan KUHAP secara garis besar pada saat ini ditentukan:

1. Berdasarkan KUHAP, yang termasuk dalam kategori penyidik ialah:
 - a). Pejabat polisi Negara republik indonesia
 - b). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.²

Selanjutnya syarat-syarat untuk diangkat menjadi penyidik diatur oleh peraturan pemerintah (PP).³ Atas kuasa Pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983, yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, dapat disimpulkan bahwa “penyidik” adalah sebagai berikut:

¹ Lihat pendapat De Pinto dalam Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: LaksBang, 2010), h. 37.

² Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³ Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- 1).Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan Dua (pelda pol), di tunjuk oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.
- 2).Komandan sektor (karena jabatannya adalah penyidik/pelda polisi tidak ada: untuk melaksanakan “penyidikan” atas usul komandan/pimpinannya, kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat “Penyidik pembantu dengan syarat-syarat:
 - Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi.
 - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a).
- c). Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atas usulan dari departemen yang bersangkutan, diangkat menteri kehakiman setelah mendengar pertimbangan jaksa agung dan kepala kepolisian Negara republik indonesia.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP dikemukakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat polisi Negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.⁴

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 1 KUHPA tersebut, dapat dipahami bahwa penyidik terdiri dari:

- Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- Pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 17, berbunyi sebagai berikut.

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHPA dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 17 PP tahun 1983, maka penyidik terdiri dari: (1) Penyidik; (2) Jaksa ; serta (3) Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴ Lihat bunyi Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

⁵ Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana: penyelidikan dan penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 76.

2. *Penyidikan.*

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁶ Penyidikan dalam KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁷

B. *Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan*

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka ia segera melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan di TKP tersebut lalu dibuatkan berita acara.⁸ Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami ataupun didegar. Berita acara ini ditutup dengan “mengingat atas sumpah jabatan” serta ditandatangani dan jika pihak lain, misalnya ketua RT atau pihak lain, maka ia turut menandatangani.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan ,Permasalahan Dan penerapan KUHAP* (Jilid I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), h. 40.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* (Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 120.

⁸ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah, yakni “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut, maka dapat diketahui secara sepintas hakikat dari suatu kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti. Sering dialami adanya kegagalan penuntutan disebabkan ketiadaan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian, khususnya dalam perkara korupsi mengenai seorang pemborong mulai melaksanakan pekerjaan borongan tercantu pada SPK yang ada pada saat pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri. Pekerjaan tersebut telah rampung/selesai sehingga unsur “kerugian keuangan Negara” tidak terbukti di persidangan. Alangkah idealnya jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tempat kejadian perkara dibuat oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa instansi termasuk instansi yang memiliki proyek tersebut.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan pula telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atau saksi pengadu, penyidik/penyidik pembantu telah dapat membuat “rencana penyidikan” yang mencakup “jadwal” dan “kegiatan”.

Dengan “rencana penyidikan” telah dapat dengan cermat diperkirakan tentang “penahanan” tersangka yang berlaku 20 hari⁹ dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari¹⁰. Penuntut umum tidak akan memberikan

⁹ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 24 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

perpanjangan jika penyidik lalai mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan harus disadari bahwa SPDP tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.¹¹

Seandainya SPDP belum ada maka “penyidik” belum bisa mulai melakukan penyidikan. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak izin penyitaan dan izin penggeledahan jika diketahuinya belum ada SPDP, demikian pula penuntut umum, dapat menolak perpanjangan penahanan yang dimaksud Pasal ayat (2) KUHP.

Terhadap penerbitan SPDP ini, agar tidak dilalaikan, karena bukan hal yang mustahil jika penasihat hukum mengajukan *Pembatalan Berita Acara Pemeriksaan* yang dibuat lebih dahulu dari SPDP.

C. Pemeriksaan Saksi-Saksi Pada Proses Penyidikan

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik¹² yang diberikan kewenangan untuk itu¹³. Penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

¹¹ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹² Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut Pasal 112 ayat (2) maka penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa padanya “biasanya baru dilakukan pada “panggilan ketiga”. Akan tetapi, dapat juga “penyidik” yang datang ke tempat kediaman saksi meskipun jarang terjadi tetapi diperkenankan oleh undang-undang.¹⁴

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹⁵ Dengan demikian, ada 3 hal yang diterangkan saksi, yakni:

- Sesuatu yang didengar sendiri.
- Sesuatu yang dilihat sendiri.
- Sesuatu yang dialami sendiri.

Keterangan saksi tidak perlu mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, merupakan keterangan saksi.

Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran seorang saksi, meskipun secara logika oleh pemikiran logika sehat dapat diterima tetapi hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “keterangan saksi”. Demikian juga keterangan

¹⁴ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

yang diperoleh dari orang lain atau dari cerita orang lain (kesaksian *auditu*), bukanlah “keterangan saksi”. Akan tetapi, ada kalanya kesaksian *auditu* bermanfaat untuk memberikan petunjuk kepada penyidik. Misalnya, si A menjelaskan bahwa si C menceritakan padanya. Kemudian saksi C didegar sebagai saksi dan memang benar C melihat kejadian/sebagai dari kejadian tersebut. Dalam hal ini, keterangan saksi A tidak diperlukan di pengadilan dan tidak perlu diikutkan dalam berkas-berkas, cukup keterangan saksi C saja.¹⁶

Ada beberapa ketentuan tentang “keterangan saksi” yakni:

1. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Misalnya, diarahkan atau disugestikan atau dipegaruhi. Saksi diwajibkan memberikan keterangan yang sebenarnya. Hal ini dapat diingatkan kepada saksi tetapi “penyidik” sebaiknya megutarakan sebelum saksi sidang mengutarakan sebelum saksi memberikan keterangan sebab jika saksi siding mengutarakan keteragannya, saksi tersebut dapat tersinggung seolah-olah petugas tidak mempercayainya. Hal ini perlu dihindari. Untuk tujuan agar saksi tidak dipegaruhi siapapun, maka saksi dipeiksa sendiri-sendiri.¹⁷ Pada Pasal 118 ayat (2) KUHP, saksi diperkenalkan tidak membubuhkan tanda tangan pada berita acara, tidak

¹⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h 84.

¹⁷ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

memuat keterangannya secara sempurna atau keliru memuatnya yang menurut penafsiran penyidik berkawajiban menuliskan tentang penolakan saksi dan alasan saksi.

2. Saksi pada tingkat penyidikan, tidak disumpah. Bagi saksi yang karena sesuatu alasan, diduga tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, misalnya, akan keluar negeri atau akan mengikuti ujian akhir suatu sekolah maka saksi tersebut memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah. Berita acara penyumpahan dilampirkan berkasnya.
3. Saksi yang berdomisili di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal saksi tersebut, jika domisili saksi tersebut jauh, sebaiknya agar member keterangan dengan mengangkat sumpah. Hal ini sesuai dengan asas : “cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Seyogyanya penyidik pun dalam pemeriksaan saksi wajib memperhatikan asas “cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Diharapkan dengan menggunakan asas tersebut dengan cermat, tidak ditemukan lagi sebagaimana hal yang diuraikan M. Yahya Harahap, yang antara lain:

“Tampaknya saksi yang diperiksa penyidik, benar-benar bingung, sehingga dalam berita acara pemeriksaan kita hanya dapat membaca jawaban atau keterangan saksi yang menjelaskan, sama sekali tidak mengetahui apa-apa akan peristiwa pidana yang bersangkutan. Namun demikian pun, penyidik

ternyata tidaksegan-segan mencantumkan saksi seperti dalam berita acara pemeriksaan”.¹⁸

Degan memuat berita acara pemeriksaan saksi, sudah barang tentu menghabiskan waktu untuk membacanya sedangkan keterangan saksi yang terantum dalam berita acara pemeriksaan tersebut tidak memp[unyai nilai apa pun. Dalam rangka penghematan terhadap pemeriksaan saksi-saksi, perlu diketahui “surat edaran’ Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1985 yang pada intinya agar dibatasi pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan pengadilan degan tujuan penghematan/efisiensi.

Di antara saksi-saksi, ada saksi-saksi yang oleh undang-undang diatur sebagai berikut:

- Dapat mengundurkan diri
- Minta dibebaskan
- Memberikan keterangan tanpa sumpah

Saksi yang dapat megundurkan diri adalah saksi yang tercantum dalam pada Pasal 168 KUHP yang berbunyi “ Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didegarkan keteragannya dapat megundurkan diri sebagai saksi”.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jilid I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), h. 40.

Adapun pihak yang dapat megundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapi derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama, sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

Rumusan Pasal 169 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Atau bersama-sama sebagai terdakwa” diperlukan karena dikhawatirkan “hubungan kekeluargaan” dapat dirusak dan pula sulit diharapkan dari mereka diperbolehkan keterangan yang sebenarnya. Akan tetapi, jika penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujui atas kehendak saksi maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.¹⁹

¹⁹ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya rumusan Pasal 169 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut “Saksi karena *jabatan diwajibkan* menyimpan rahasia, dapat *minta dibaskan* dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi”.²⁰

Saksi yang memberi keterangan *tanpa disumpah*:

- Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.
- Orang gila/sakit ingatan, meskipun kadang-kadang ingatannya baik (pasal 171 KUHP).
- Yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 168 KUHP tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa (Pasal 169 ayat (2) KUHP).

Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi atau perilaku yang memperlakukan saksi-saksi seolah-olah tersangka di saman HIR. Hargailah saksi dengan cara, jika dalam panggilan diminta hadir jam 09:00 WIB, hindarkanlah saksi tersebut menunggu agar demikian, hal-hal yang menyebabkan ia terlupa sebagai dapat dicegah.

Sebagai penutup mengenai keterangan saksi ini, agar diperhatikan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang merumuskan asas-asas *Unus testis nullus testis* (satu

²⁰ Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

orang saksi, bukan saksi) yakni keterangan satu orang saksi saja, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa

Dapat memberikan keterangan berbentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai saksi jika member keterangan di dalam sidang. Sebaliknya, keterangan tertulis yang diberikan oleh saksi merupakan alat bukti “surat”.²¹

D. Penyitaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan

1. Penyitaan.

“Penyitaan” yang berakar dari kata “sita” pada Pasal 1 butir 16 diartikan sebagai berikut “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.²²

Rumusan di atas dapat menurut Leden Marpaung dikatakan “berlebihan”.²³ Bukankah penyidikan, penuntutan berkenaan dengan peradilan?. Dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tercantum kata “peradilan” yang diartikan dengan: “segala sesuatu mengenai

²¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan* (Edis II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 92.

²² Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²³ Leden Marpaung, *Op. cit.*, h. 95.

perkara pengadilan”.²⁴ Sering kata “pengadilan” dan kata “peradilan” digunakan tidak tepat, berlainan dengan bahasa Inggris yang menggunakan kata *justice* untuk peradilan dan *court* untuk pengadilan. Rumusan di atas jika dirumuskan saja dengan “untuk kepentingan peradilan” telah jelas dan tepat.

Dari rumusan Pasal 1 butir 16, dapat diketahui bahwa “penyitaan” tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni oleh:

- Pejabat polisi Negara republik indonesia tertentu;
- PPNS;
- Komandan sektor
- Penyidik pembantu;
- Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu (Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).

Sebelum dilakukan “penyidikan”, maka ternyata penyidik berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan atas barang-barang yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) yang dapat dilakukan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 108.

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi peyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lainya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.²⁵

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin ketua pengadilan negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri “*resume*” dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Permintaan Izin penyitaan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat.²⁶ Rumusan “ketua pengadilan negeri setempat” dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya.

Menurut M. Yahya Harahap, mengutarakan antara lain:

²⁵ Lihat selengkapnya bunyi Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Diatur pada Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Salah satu tujuan pokok dalam perizinan penyitaan harus ada dari ketua pengadilan negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan penegndalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Bertitik tolak dari latar belakang pemberian pengawasan dan pengendalian, ketua pengadilan tinggi berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan yang diajukan penyidik. Cuma setiap penolakan izin yang dilakukannya, haruslah dengan alasa-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang”.²⁷

Pada lampiran surat keputusan menteri kehakiman Nomor: M.01.PW.07.30 tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang “bidang penyidikan”, dikemukakan bahwa “guna melakukan penyitaan, maka penyidik:

- a. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung malkukan peyitaan terhadap atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti,

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jilid I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), h. 288.

terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan, pengangkutan apabila barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya.²⁸

- b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu berada disita²⁹.
- c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan padanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka, ditunjukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana. Adapun penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara hanyalah atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri.³⁰
- d. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang itu

²⁸Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 38, 40 dan 41 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁹Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁰Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 42 dan 43 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

dengan disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi.³¹

- e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibaca, diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarga, kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi dan turun berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita.³²

2. Pengeledahan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara tegas telah menentukan bahwa tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainya untuk melakukan tindak pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³³

Selanjutnya, pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari

³¹Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³²Lihat ketentuan berdasarkan bunyi Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³³Lihat selengkapnya bunyi Pasal 1 butir 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

benda yang diduga keras ada pada badanya atau dibawahnya serta untuk disita”.³⁴

Baik “pengeledahan rumah” maupun “pengeledahan badan” hanya dapat dilakukan “penyidik”. Khusus terhadap pengeledahan badan, hanya dapat dilakukan atas diri tersangka. Pada rumusan Pasal 1 butir 17 KUHPA tercantum:”..... hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Yang dimaksud adalah Bab III bagian ketiga, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHPA. Dalam laporan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor I. PW.07.03 tahun 1983 tanggal 4 pebruari 1982, bidang penyidikan, Bab II, antara lain tecantum:

Penyidik pembantu atau penyidik dalam melakukan pengeledahan rumah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat.³⁵
- b. Dalam keadaan sagat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera lapor kepada ketua pegadilan negeri setempat.³⁶
- c. Terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya.³⁷

³⁴Lihat selengkapnya bunyi Pasal 1 butir 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁶ Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju atau kepala desa ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak dan tidak hadir.³⁸
- e. Membuat berita acara tentang jalanya dan hasil pengeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berita acara dibacakan kepada yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik. Tersangka dan keluarganya, kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi.³⁹
- f. Untuk keamanan dan ketertiban, dapat diadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut.⁴⁰
- g. Walaupun penyidik pembantu dan penyidik berwenang untuk mengadakan pengeledahan rumah tetapi pada tempat-tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan masuk, yaitu ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung

³⁷ Pasal 125 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁸ Pasal 33 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ Pasal 33 ayat (5) dan pasal 126 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁰ Pasal 127 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

ibada dan atau upacara keagamaan serta ruang di mana sedang berlangsung siding pengadilan.⁴¹

- h. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada di luar daerah hukum pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan melaksanakannya didampingi penyidik setempat.⁴²

Rumusan penjelasan di atas belum mencakup penjelasan-penjelasan resmi dari Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP secara keseluruhan, yang antara lain:

- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik”.
- Penjelasan Pasal 33 ayat (4) berbunyi: “ yang dimaksud dengan “dua orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang di maksud dengan “ketua Lingkungan” adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua warga, ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.”
- Penjelasan pasal 34 ayat (1) yang memuat: “ keadaan yang sangat perlu dan mendesak” adalah bilaman di tempat yang akan digeledah diduga keras

⁴¹ Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁴² Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindah sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu singkat.

3. Penangkapan dan penahanan.

a. Penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴³

Dari rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Pengekangan sementara waktu kebebasan.
- Tersangka atau terdakwa.
- Terdapat cukup bukti.
- Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.

Dari unsur-unsur di atas, yang menjadi masalah adalah “terdapat cukup bukti”. Perkataan “cukup” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti:

- Tidak kurang,

⁴³Pada pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Lengkap,
- Sudah memadai,
- Lumayan, sedang.

Akan tetapi, jika dihubungkan dengan Pasal 17 KUHP maka pemakaian kata “cukup” pada Pasal 1 butir 20, tidak tepat karena pada Pasal 17 KUHP dirumuskan “bukti permulaan yang cukup”. Di sini yang cukup adalah bukti permulaan. Pasal 17 KUHP mencantumkan “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.01.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 4 Februari 1982, Bidang Penyidikan, tercantum antara lain Undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa itu “Bukti Permulaan”. Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan, sesuatu itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan apalagi bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ialah pelakunya.

Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap

penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidik akan mengalami kesulitan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diartikan bahwa KUHP menyerahkan kepada praktik, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan”.

Tetapi bila didasarkan pada “kewajaran”, apakah telah cukup menjamin bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, karena jika berbicara dengan “kewajaran” maka seyogianya tidak perlu ditangkap, cukup dilakukan pemanggilan, dengan mencantumkan sanksi Pasal 216 KUHP. Kecuali orang tersebut telah dipanggil tidak mau memenuhi panggilan bahkan melarikan diri misalnya, maka “Wajar” jika dilakukan penangkapan. Sudah tiba saatnya semua aparat penegak hukum menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mendambakan kehormatan agar dengan demikian bertumbuh dan berkembang pada diri sanubarinya “perasaan malu”. “malu” berhadapan dengan aparat penegak hukum atau malu terlibat dengan suatu perkara, akan membawa dampak positif bagi tegaknya hukum, karena yang bersangkutan akan senantiasa menjaga dan mengendalikan “perilaku”nya.

Sebaiknya “penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dihapuskan saja agar dengan demikian, semua aparat penegak hukum, mencari dan mengumpulkan alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHP yakni:

- Keterangan saksi,
- Keterangan ahli,
- Surat,
- Petunjuk, dan
- Keterangan terdakwa.

“Keterangan terdakwa” diperkirakan sengaja diberi urutan terakhir agar dengan demikian alam pikiran HIR dapat dijauhkan. Sudah tidak zamannya lagi tersangka/terdakwa perlu mengakui kesalahan/perbuatan tetapi aparat penegak hukum berkewajiban mencari dan mengumpulkan alat bukti sah.

Hal di atas tentu harus dibedakan dengan tertangkap tangan yang berdasarkan Pasal 1 butir 19 diartikan sebagai berikut “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

b. Penahanan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁴

Rumusan di atas, dengan kata penahanan yang berasal dari kata asal “tahan”, perlu diteliti keterkaitannya. Dalam bahasa Inggris, kata penahanan adalah “*arrest*” yang dalam “*The Lexicon Webster’s Dictionary*” mencakup arti antara lain: *to remain, to rest, to stop*. Dalam bahasa Indonesia, tercakup arti “penahanan”: proses, perbuatan, cara menahan, penghambatan.⁴⁵ Hakikat daripada “penahanan” adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini memang telah tercantum dalam pengertian penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu.

Yang dapat dikenakan penahanan yakni “tersangka” atau “terdakwa”, tetapi tidak semua tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

⁴⁴ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit.*, h. 185.

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.⁴⁶

Rumusan di atas sesungguhnya telah berlebihan karena Pasal 1 butir 14 KUHAP telah mencantumkan arti/makna “tersangka” dan Pasal 1 butir 15 mencantumkan arti/makna “terdakwa”. Rumusan “yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” sesungguhnya telah tercakup dalam arti/makna “tersangka” atau “terdakwa”.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) alasan yang merupakan perlunya penahanan, yakni:

- Kekhawatiran melarikan diri, atau
- Merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
- Mengulangi tindak pidana.

Ketiga keperluan tersebut merupakan alternatif. Dengan demikian, berarti cukup jika salah satu dari ketiga hal tersebut. Namun, pada “Surat Perintah Penahanan”, ketiga hal tersebut selalu dicantumkan (Lampiran XII). Dengan ketiga alasan di atas, tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Masih ditentukan oleh Pasal 21 ayat (4) KUHAP syarat-syarat yang harus dipenuhi secara hukum agar tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan.

⁴⁶ Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21 ayat (4) KUHP mencantumkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Tersangka/terdakwa yang diancam pidana sebagai dicantumkan Pasal 21 ayat (4)a atau b dan untuk keperluan sebagaimana tercantum Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan penahanan. “Dapat” digarisbawahi, sebab tidak mesti/harus dilakukan penahanan.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

A. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekwensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Keculai dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keragu-raguan. Jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.

Nabi Muhammad s.a.w Bersabda: “ hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika memang imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum” . tafsir hadis muhammad Qutb

Dalam hokum pidana islam asas praduga tak bersalah sejalan dengan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain seperti halnya yang dijelaskan dalam al-Quran surat Faathir ayat 18 yang berbunyi

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا تُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا

قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَرَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۚ

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥٥﴾

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[1252]. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekali pun) mereka tidak melihatNya[1253] dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

[1252] Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

[1253] sebagian ahli tafsir menafsirkan bil ghaib dalam ayat Ini ialah ketika orang-orang itu sendirian tanpa melihat orang lain.

Sedangkan asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang

ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pegertian asas praduga tak bersalah dapat kita temukan dalam beberapa dokumen-dokumen internasional diantaranya. rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 Pasal 2, *Internasional Covenan on civil and Politcal/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik* (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *"Evreyone charge with everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumen innocent untill proved guilty according to law"*.¹

The Universal Declaration of Human Rights, article 11, states: *Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees necessary for their defence.*² Dalam bukunya *The Universal Declaration Of Human Rigt : A Common Standard Of A Chieivemen*. Oleh Gudmundur al-Fresson memberikan depenisi mengenai asas praduga tak bersalah yakni *"presumption of inncence: the burden of proof of the charge is the prosecution ang the accused has yhe benefit of doub; no guilt can be presumed until the charge has been proved beyond*

¹ *Internasional Covenan on civil and Politca*

² *The Universal Declaration of Human Rights, article 11*

*a reasonable doubt; and all public authorities have a duty to refrain from prejudging the outcome of a trial.*³

B. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga tak bersalah

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”⁴.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

³ Gudmundur al Fresson, *Universal Declaration of Human Right: A Common Standard of A Chieoemen* (American Journal of International Law, 2000), h. 244.

⁴ Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Demikian halnya dalam Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 yang isinya sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵.

Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain: “

“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”⁶.

⁵ Pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.⁷

C. Prinsip-Prinsip Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Prinsip pemeriksaan akusatur ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberikan perisai-perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai yang diakui hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai “posisi yang setaraf” dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti yang dilihat pada bab VI:

Prinsip penerapan asas praduga tak bersalah, meliputi:

1. Tersangka/terdakwa segera mendapatkan “pemeriksaan oleh penyidik” dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.⁸

⁷ Lihat dalam Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: laksbang, 2010), h. 62.

⁸ Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Tersangka/ terdakwa segera diajukan ke pengadilan dan “segera diadili” oleh pengadilan.⁹
3. Tersangka/terdakwa berhak untuk “diberitahu dengan jelas” dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang “apa yang disangkakan” kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.¹⁰
4. Tersangka/terdakwa berhak untuk “diberitahuakan dengan jelas” dalam bahasa yang dimegerti olehnya tentang apa yang “didakwakan” kepadanya, yang tujuannya adalah untuk member kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan.¹¹
5. Tersangka/terdakwa berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²
6. Tersangka/terdakwa berhak untuk setiap waktu “mendapatkan bantuan” juru bahasa pada setiap tingkatan pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia.¹³ Tersangka/terdakwa berhak

⁹ Pasal 50 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹² Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

mendapatkan “bantuan hukum” dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.¹⁴

7. Tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya¹⁵ bahkan mengenai bantuan penasehat hokum, bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka/terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapatkan bantuan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat “wajib” menunjuka penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya.
8. Tersangka/terdakwa berhak mengunjungu dan “dikunjungi dokter” pribadinya selama ia dalam tahanan.¹⁶
9. Tersangka/terdakwa berhak untuk “diberitahukan kepada keluarganya” atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.¹⁷

¹⁴ Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

10. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan “menerima kunjungan” dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan penagguhan penahanan atau bantuan hukum¹⁸
11. Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa.¹⁹
12. Tersangka/terdakwa berhak “mengirim surat” dan “menerima surat” setiap kali diperlukanya yang kepadanya dan dari: Penasihat hukumnya, Sanak keluarga. Untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan.²⁰
13. Surat-menyurat ini “tidak boleh diperiksa” oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut.²¹
14. Tersangka/terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang “terbuka untuk umum”.²²

¹⁸ Pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Pasal 61 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Pasal 62 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²¹ Pasal 62 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²² Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

15. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan “mengajukan” saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*).²³
16. Tersangka/terdakwa “tidak dibebani kewajiban pembuktian”²⁴. Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.
17. Tersangka/terdakwa berhak menuntut “ganti rugi” dan “rehabilitasi” atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum.²⁵

D. Pentingnya Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit, namun secara holistik. Dengan demikian, penegak hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka/terdakwa, melainkan juga penegakan hukum terhadap norma-norma

²³ Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sebagai konsekwensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.²⁶

Menurut Mardjono Resdiputro asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya (a) perlindungan terhadap tindakan sewenag-wenag dari pejabat Negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²⁷

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Negara kita menganandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana

²⁶Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981), h. 251.

²⁷Marjono Reskodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, 1994), h. 36.

dalam proses pemeriksaan perkara jagan sampai diperkosa hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan²⁸ sehingga dalam proses penyidikan penerapan asas praduga tak bersalah sangatlah penting.



²⁸ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), h. 158.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Bulukumba.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi selatan) luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km², jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba kurang lebih 347.338 jiwa. Secara geografis Kota Bulukumba terletak antara 05°20' - 05°40' LS dan 119°58' - 120°28' BT . (Bulukumba Dalam Angka, 2009).

Secara administratif Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Pulau selayar.

Keadaan topografi yang digambarkan sebagai berikut : daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: kecamatan gantang, kecamatan ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang

dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumpa terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Keadaan iklim Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisaran antara 23, 82°C – 27,68°C. suhu pada kisaran ini cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis smith-ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Fasilitas Transportasi Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai pintu Penghubung antar Kabupaten di Bagian Timur yang menghubungkan Pulau Sulawesi dan Kepulauan Selayar. Untuk mendukung fungsi tersebut, maka di Kabupaten Bulukumba terdapat pelabuhan laut yaitu (1) Pelabuhan penyeberangan ferry, (2) Pelabuhan Nelayan dan sebagai akses penghubung antar Kabupaten. Dari barat ke utara atau sebaliknya, jalan trans Kabupaten di Kabupaten Bulukumba cukup baik dan memadai.

Pada pengembangan sistem transportasi regional jalan raya Kabupaten bulukumba dapat dihubungkan dengan kota-kota kecamatan yang ada di

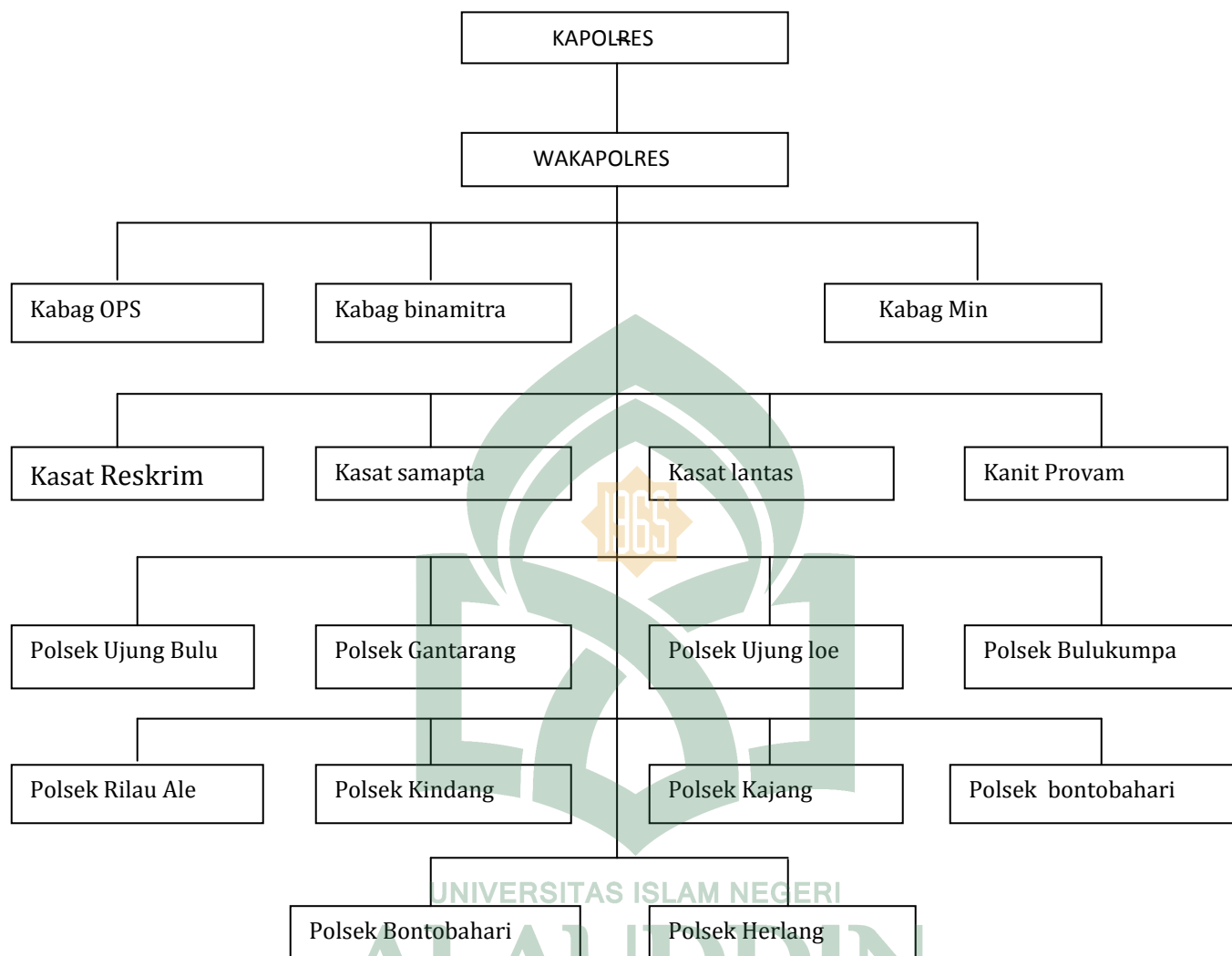
kabupaten bulukumba, melalui jalan negara dengan kondisi serta intensitas lalu lintas yang cukup baik.

2. Profil Polres Bulukumba.

Wilayah Hukum Polisi Resort Bulukumba meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 10 Kecamatan yakni.: Ujungbulu (ibu kota Kabupaten), Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Ujung Loe, yang disetiap kecamatannya mempunyai Polsek (polisi sektor) masing-masing.

Struktur jajaran di kepolisian Resort Bulukumba. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba bernama AKBP. Arif Rahman, Wakapolres AKP Novly.F.Fotoy, Kabag OPS Kompol A. Muh. Amir, Kabag Min AKP Basri. S.H, Kabag binamitra kompol H.Muh Arfah. S.Ag, Kasat Reskrim AKP Jawaluddin. SH.MH, Kasat lantas AKP Tahang Abdullah, Kasat samapta AKP Muh. Jufri, kanit Provos Iptu H.Muh. Yusuf. Struktur kepolisian Resort Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Sumber: Bagian Administrasi Polres Bulukumba

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP. Arif Rahman, diperoleh informasi bahwa guna mewujudkan peran Polri sebagai pelindung, pengayoam, dan pelayan masyarakat, maka tugas Polres Bulukumba secara umum pada tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas.
2. Melakukan kegiatan frepentif dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan potensi partisipasi masyarakat dalam sistem bimbingan keamanan dan ketertiban masyarakat (sisbin kamtibmas).
3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat serta kegiatan masyarakat baik bersifat lokal, nasional.
4. Meningkatkan kegiatan refresif dalam rangka menegakkan hukum dan dalam menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.
5. Menyiapkan Pegamanan, khususnya dalam menaggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berkadar tinggi yang

dapat terjadi diawal maupun Setelah Pemilihan umum Kepala daerah (Pilkada) yang akan di laksana .¹

Secara sturuktur organisasi, satuan-satuan tugas pada Kepolisian Resort Bulukumba, adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reserse dan Kriminal membawahi satuan reskrim yang bertugas menagani tindakan-tindakan kriminal secara umum yang ada dalam masyarakat.
2. Kasat Reserse dan Kriminal terkadang juga membantu satuan narkotika dalam menumpas peredaran gelap narkotika dan satuan lalu-lintas jika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang diduga merupakan tindakan kriminal. Tugas lainnya adalah membawahi satuan narkoba yang bertugas membongkar dan menagani jaringan pengedar narkotika dan fisikotropika dan bahan-bahan aditif lainnya yang berbahaya.
3. Kasat lantas membawahi satuan lalu-lintas yang mengendalikan kelancaran berlalu-lintas sampai menindak tegas para pelanggar lalu-lintas.
4. Kabag binamitra membawahi satuan binamitra yang bertugas menggalang hubungan baik dengan mitra polisi yang ada, misalnya untuk saat ini mitra polisi yang sangat erat adalah masyarakat, maka satuan binamitra bertugas untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat luas.

¹AKBP. Arif Rahman (Kapolres Bulukumba, Wawancara tanggal 10 Agustus 2010).

5. Kanit provam membawahi satuan provos yakni badan kepolisian yang menagani masalah yang terkait dengan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh oknum polisi dilapangan.
6. Kapolsek membawahi satuan kepolisian yang berada dalam sektor tertentu (kecamatan) tetapi masih tetap dalam lingkup Polres, bertugas mengamankan wilayahnya dan tetap berkordinasi dengan Polres yang merupakan Induk dari struktur kepolisian di kabupaten

Selain tugas pokok tersebut, tiap satuan bertugas untuk berkoordinasi dengan satuan yang sama, namun dalam jajaran yang berbeda yakni jajaran yang berada di atasnya dan di bawahnya, seperti satuan yang ada di Kepolisian Sul-Sel-Bar

Penelitian skripsi ini difokuskan pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bulukumba. Menurut AKP Jawaluddin, bahwa :

“Fungsi Reskrim di Polres Bulukumba adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka Penyidikan tindak pidana. Fungsi reserse umum, ekonomi, narkoba, uang palsu, koordinasi PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal. Sedangkan tugas pokok Sat Reskrim di Polres Bulukumba dalam menagani kasus-kasus adalah melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan dan koordinasi serta Pengawasan terhadap PPNS berdasarkan undang-undang sebagai aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan lainnya.²

² AKP Jawaluddin (Kasat Reserse dan Kriminal, wawancara tanggal 12 Agustus 2010).

B. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Jawaluddi, diperoleh keterangan bahwa “pada perinsipnya penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana pencurian yang terjadi dalam wilayah hukumnya harus berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang mengaturnya”.³ Menurutnnya dalam penyidikan, tata cara pemeriksaan tersangka (secara hukum) oleh penyidik antara lain:

1. Jawaban atau keterangannya harus di berikan tanpa tekanan dari siapapun dan juga bentuk apapun.
2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka:
 - a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakannya.
 - b. Dan keterangan tersebut;
 - Di catat dalama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
 - Setelah dicatat, ditanyakan/dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Jika ada yang tidak sesuai menurutnya maka ia harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujuinya/terjadi kesalahan pengetikan untuk kemudian diperbaiki.

³*Ibid.*

- Bila tersangka sudah menyetujui isi berita acara pemeriksaannya maka ia membubuhkan tanda tangannya. Bila ia merasa dibawah tekanan, atau tersangka merasa penyidik tidak mau memperbaiki sesuai fakta yang dipahaminya, maka ia dapat saja menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Dan penyidik akan membuat catatan tentang hal itu serta alasan tersangka tidak menandatangani berita acara pemeriksaannya.
- 3. Jika tersangka yang akan diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, maka penyidik dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik di wilayah hukum tempat tinggal tersangka.
- 4. Atau jika tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka penyidikan dapat dilakukan di tempat tersangka dengan cara penyidik yang mendatangi tersangka.

Pada masing-masing petugas penyidik dalam satuan reserse kriminal di Polres Bulukumba, mempunyai persepsi yang beragam dalam memaknai asas praduga tak bersalah.

Menurut Bripka Anwar misalnya, penerapan asas praduga tak bersalah adalah tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan

bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan pencurian sebagaimana yang disangkakan kepadanya.⁴

Sedangkan menurut Bripka Aripin, yang dimaksud dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan, adalah melakukan penyidikan secara benar berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, yang mengarah kepada adanya bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan kesalahan sebagaimana yang disangkakan kepadanya, dan hal inilah yang selalu dilakukannya dalam setiap melakukan penyidikan.⁵

Berbeda dengan keterangan kedua penyidik tersebut di atas, menurut Bripka Herman, bahwa :

“Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tidaklah selalu berarti mengikuti aturan-aturan yang ada dan menganggap bahwa tersangka tidak bersalah, akan tetapi penyidik dapat melakukan diskresi jika terdapat beberapa petunjuk dan dapat diyakini adanya bahwa si tersangka tersebut benar-benar telah melakukan kesalahan yang disangkakan kepadanya, tanpa harus menunggu sampai ada keputusan tetap dari pengadilan. Namun demikian, hak-hak tersangka harus tetap dijaga oleh penyidik sebagaimana halnya dengan orang yang belum atau tidak melakukan kesalahan sama sekali”.⁶

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan asas praduga tak bersalah itu adalah :

⁴ Bripka Anwar (Penyidik, wawancara tanggal 13 Agustus 2010).

⁵ Bripka Aripin (Penyidik, wawancara tanggal 13 Agustus 2010).

⁶ Bripka Herman (Penyidik, wawancara tanggal 13 Agustus 2010).

- penjelasan umum butir 3c Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang isinya: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 8.

Berdasarkan beberapa keterangan penyidik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan, khususnya pada kasus pencurian di Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba masih sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh masing-masing pemahaman penyidik tentang makna dari “asas praduga tak bersalah” tersebut.

Beragamnya pemahaman para penyidik kepolisian tentang makna asas praduga tak bersalah tersebut, selain disebabkan oleh rumusan dalam peraturan perundang-undang yang “kurang jelas” mengenai hakikat asas praduga tak bersalah, juga karena kurangnya pelatihan yang diberikan kepada penyidik sehingga penyidik yang masih berpangkat (Bintara) yakni Briptu dan Bripta masih kurang atau belum memahami dengan benar mengenai arti dan bagaimana menerapkan “asas praduga tak bersalah” tersebut sebagaimana mestinya.

Di Polresta Bulukumba terjadi kasus penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik⁷ yang menimpa Indara Bin Baso. Pada saat pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap Indara Bin Baso, penyidik tidak mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Indara Bin Baso kecuali adanya laporan dari pihak yang barangnya hilang. Pihak yang kehilangan barang tersebut melapor ke Polres Bulukumba dan ditindak lanjuti oleh penyidik dengan melakukan penangkapan langsung terhadap Indra Bin Baso yang disangka telah melakukan pencurian. Pada saat tersangka berada di Polres Bulukumba langsung disidik oleh penyidik Bripka Massarapi.

Namun hal yang sangat disayangkan oleh beberapa kalangan, teruma para pemerhati hukum, adalah tindakan penyidik Bripka Massarapi yang telah melakukan serangkaian tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib peyidikan dan di luar konteks “praduga tak bersalah” seperti melakukan pemukulan serta serangkaian tindakan kekerasan lainnya agar tersangka mengakui perbuatan pencurian.

Meskipun Indra Bin Baso dipukuli tetapi ia tetap tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena ia merasa tidak melakukan perbuatan tersebut, walaupun dalam banyak kasus, salah tangkap diiringi dengan penyiksaan pada saat penyidikan seringkali menandatangani berita acara pemeriksaan, yang membuat pengadilan akhirnya memutuskan

⁷ dimana terjadi di Polres Bulukumba

bersalah. Setelah beberapa waktu menjalani masa tahanan, keluarga tersangka melaporkan hal tersebut ke Propam/Provos Polres Bulukumba dengan dalih penyidik tidak kuat bukti untuk menahan tersangka Indra Bin Baso terlebih lagi pada saat penyidikan, penyidik melakukan penyiksaan “pemukulan” kepada Indra, maka pada saat itu penyidik, divisi propam yang merupakan divisi yang melakukan penindakan terhadap anggota polri yang melakukan tindakan melanggar hukum langsung melakukan investigasi kasus tersebut, yang pada akhirnya Provam/Provos yang melakukan investigasi menemukan bukti yang kuat untuk membawa berita acara pemeriksaan kepada dewan kode etik kepolisian.

Pada saat sidang kode di gelar di aula serba guna polres bulukumba yang dihadiri oleh keluarga korban Indara Bin Baso, pimpinan siding kode etik Iptu H.Muh. Yusuf SH. menjatuhkan hukuman sanksi kepada BRIPKA Masarafi dengan hukuman kurungan penjara selama 14 hari di tahanan Provos Polres Bulukumba. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan penuntut umum dalam siding kode etik yakni 3 bulan kurungan penjara. Vonis tersebut diterima Bripka Massarapi dan tidak mengajukan banding.

Kasus lain sebagai bukti adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah adalah yang dilakukan oleh Alimin bin Katu yang kasusnya sementara dalam masa penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba. Menurut Alimin Bin Katu mengemukakan bahwa:

Selama masa penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba, saya selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan (penyiksaan) dan merendahkan martabat saya sebagai manusia. Saya disiksa sebagai layaknya seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian walaupun saya selalu menyangkali tuduhan tersebut dan belum keluar putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai benar tidaknya tuduhan tersebut.⁸

Berdasarkan keterangan penyidik, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka telah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang tentang tata cara penangkapan yakni Pasal 18 KUHP, tetapi menurut tersangka bahwa pada masa penahanan ia seringkali diperlakukan kurang menyenangkan. Pada saat pemeriksaan seringkali tersangka diperlakukan kasar, misalnya ketika penyidik menanyakan suatu pertanyaan yang terlambat dijawab tersangka atau tersangka menjawabnya berbelit-belit. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka/terdakwa berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada tahap penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain tindakan yang tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah tersebut di atas, terdapat juga tindakan penyidikan yang telah sesuai dengan aturan dan tata cara penyidikan, misalnya yang dialami oleh Jufri Bin Yusup

⁸ Alimin Bin Katu, tersangka tindak pidana pencurian, wawancara tanggal 14 Agustus 2010.

yang mengatakan bahwa selama menjalani proses penyidikan ia tidak pernah diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang sudah terbukti bersalah.⁹

Berdasarkan beberapa keterangan tersangka yang kasusnya masih dalam penyidikan tersebut di atas, maka dalam hal pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang telah masuk dalam ranah pidana yang dilakukan pihak kepolisian, kasus penganiayaan ataupun tindakan yang melanggar peraturan yang terkait pelaksanaan penyidikan, sudah sesuai Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2009 Pasal 6 tentang Standar Perilaku Petugas/Anggota POLRI dalam Penegakan Hukum, yang terdiri atas: Standar Perilaku Secara Umum, seperti, larangan untuk menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan; Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Dalam Tindakan Kepolisian, seperti, larangan untuk melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; dan berbagai aturan Perilaku yang berkaitan dengan Tindakan Pemanggilan, Tindakan Penangkapan, Tindakan Penahanan, Tindakan Pemeriksaan, Tindakan Penggeledahan Orang dan Tempat, Tindakan Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, Tindakan Penyitaan Barang Bukti. Bab keempat memuat materi

⁹ Jufri Bin Yusup dan Ridwan bin Matto, tersangka tindak pidana pencurian, wawancara tanggal 14 Agustus 2010.

tentang Perlindungan HAM Bagi Tersangka yang terdiri atas: Prinsip Praduga tak bersalah; Hak Tersangka; Hak Untuk Diadili Secara Adil; Penghormatan Martabat dan Privasi Seseorang. Bab kelima memuat materi Tugas Pemeliharaan Kamtibmas Berlandaskan HAM, yang terdiri atas: Perilaku Petugas yang antara lain, mewajibkan setiap Petugas untuk memperlakukan korban, saksi, tersangka / tahanan dan setiap orang yang membutuhkan pelayanan polisi secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Perlindungan HAM Dalam situasi darurat, yang antara lain menegaskan HAM yang merupakan non-derogable rights seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya tidak boleh dikurangi; Perlindungan HAM dalam kerusuhan massal yang antara lain menegaskan, “Setiap anggota Polri dilarang melakukan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan; Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api yang antara lain menegaskan, tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah; Bab keenam memuat materi Perlindungan HAM Dalam Tugas Pelayanan Masyarakat, antara lain menegaskan keadilan dalam pelayanan masyarakat dan pelayanan terhadap Korban dan Saksi; Perlindungan HAM Bagi Anggota Polri, yang antara lain menegaskan Setiap anggota Polri harus bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya; Bab ketujuh tentang Pembinaan dan Pengawasan memuat materi antara lain, kewajiban setiap

anggota untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam menerapkan aturan tentang HAM di dalam pelaksanaan tugasnya; kewajiban pejabat Polri untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas mengandung muatan norma HAM yang relatif lengkap dan merupakan bahan yang berguna dan penting bagi sosialisasi dan pembudayaan HAM di kalangan Polisi.¹⁰ Namun ini tidak menjadi jaminan efektivitas perlindungan HAM bagi masyarakat.

Usaha internal POLRI untuk melakukan perlindungan HAM penting untuk terus dilakukan. Namun usaha ini bisa optimal dan mampu mencapai tujuannya bila ada peran serta masyarakat sipil, antara lain, Advokat, Wartawan, para pemuda, dan kalangan masyarakat luas. Dalam upaya untuk menjamin penegakan HAM yang adil dan proporsional itu diperlukan kehadiran para Advokat dan para pekerja bantuan hukum untuk turut mengawasi kerja polisi pada proses pemeriksaan perkara pidana, termasuk tentunya tahap penyidikan.

Meskipun contoh pertama dan kedua tersebut di atas bersifat kasuistik, tetapi contoh-contoh tersebut mestinya ditindak tegas secara hukum agar tidak terjadi lagi pada kasus-kasus berikutnya.

¹⁰ AKBP. Arief Rahman, Kapolres Bulukumba, wawancara tanggal 10 Agustus 2010.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba

Penerapan asas praduga tak bersalah bukanlah istilah asing lagi di kalangan penyidik karena asas praduga tak bersalah telah ada dan tercantum dalam KUHP. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Oleh karena itu tersangka belum dikatakan bersalah sampai adanya putusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa manfaat dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penerapan asas ini, tersangka wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan tetap dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kesalahan sebagaimana telah disangkakan kepadanya.

Beberapa faktor yang mendukung efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba adalah:

1. Faktor internal.

a. Subtansi hukum.

Adanya aturan-aturan hukum/undang-undang yang mengatur mengenai tugas dan wewenang penyidik merupakan salah satu faktor pendukung dari penerapan asas praduga tak bersalah tersebut karena didalamnya telah diatur

mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang penyidik dalam proses penyidikan.

Hal tersebut diakui oleh AKBP. Arif Rahman, bahwa :

“Dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba, memperjelas gerak polisi pada saat penyidikan. Sehingga batasan mana boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga menghindarkan para penyidik dalam melakukan penyidikan memperlakukan tersangka dengan seenak-enaknya tanpa memperhatikan hak asasi tersangka”.¹¹

b. Faktor Instruksi dari atasan.

Instruksi dari pihak atasan sangat membantu bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini senada dengan yang dikatakan AKP Jawaluddin bahwa “sekalipun tugas penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalisme kerja, tetapi terkadang ,masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan secara langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta berwenang dibandingkan dengan bawahannya. Instruksi dari atasan untuk memperose atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan tengah terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian dukungan dari atasan yang berupa perintah atau petunjuk tersebut telah menjadi pendorong

¹¹ ABP. Arif Rahman (Kapolres Bulukumba, wawancara tanggal 10 Agustus 2010).

untuk penerapan asas praduga tak bersalah, karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk melaksanakannya.

c. Faktor petugas penyidik.

Petugas polisi mempunyai kedudukan dan status yang sangat beraneka ragam, tentu saja kedudunya yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda-beda dengan polisi pada lingkup tugas yang la

2. Faktor eksternal.

a. Dukungan dari Lembaga swadaya masyarakat.

Dukungan dari yakni melakukan pemantau terhadap pelaksanaan dan fungsi dari polisi dalam hal ini penyidikan, agar dalam melakukan penyidikan aparat kepolisian tetap berada dalam jalur yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Faktor budaya

Keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal penerapan asas praduga tak bersalah.

Faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di kepolisian resort Bulukumba.

1. Faktor Internal

a. Faktor struktural

Dukungan sarana maupun prasana penyelidikan dan penyidikan pada fungsi reskrim saat ini secara umum dapat dikatakan belum optimal. Contoh riilnya antara lain 1. Perangkat computer, printer, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain sebagian masih disediakan secara swadaya oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat batasan anggaran dari dinas tidak memadai; 2. Peralatan Olah TKP yang tidak lengkap dan tidak terdukung anggaran dengan optimal, sehingga pemenuhannya masih perlu didukung secara swadaya oleh satuan fungsi reskrim di kepolisian resort bulukumba, misalnya pengadaan film kamera, CD, kartu sidik jari dan lain-lain untuk keperluan identifikasi; 3. Kendaraan dinas untuk fungsi reskrim di setiap satuan kerja sangat minim; 4. Tidak tersedianya ruang penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang memadai seringkali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti hilangnya berkas perkara atau barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk; dan lain-lain (wawancara dengan AKP Jamaluddin 12 Agustus 2010).

b. Kurang Optimalnya Profesionalitas dan keahlian polisi

Polisi Profesional adalah polisi yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang diterimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada saat penelitian di Satreskrim Polres Bulukumba terungkap bahwa personel yang memiliki latar

belakang pendidikan yang tinggi hanya ada beberapa saja, sehingga membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik, hal ini mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat.

Masih sedikitnya personel di Polres Bulukumba yang memiliki profesionalitas kerja yang tinggi membawa akibat bagus atau tidaknya pekerjaan mereka dilapangan dan khusus untuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan, jika profesionalisme dan keahlian polisi rendah tentunya pemahaman akan asas praduga tak bersalah akan tidak terlaksana dengan optimal.

c. Oknum aparat.

Oknum aparat dapat menentukan terlaksana atau tidaknya penerapan asas praduga tak bersalah. Adanya penyidik yang masih mengedepankan intervensinya atau tekanan selaku penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka walaupun hal itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (hasil Wawancara dengan AKP Jawaluddin selaku kanit reserse)¹²

¹² Wawancara paada tanggal 12 agustus 2010.

2. Faktor eksternal

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah yang cenderung telah menganggap bahwa tersangka atau terdakwa tindak pidana pencurian telah melakukan tindak pidana tersebut sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan

1. Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian karena prinsip ini menjamin hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Asas praduga tak bersalah secara umum meskipun belum sepenuhnya optimal telah diterapkan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Bulukumba hanya saja yang menimpa beberapa tersangka bersipat kasuistik tetapi contoh-contoh tersebut mestinya ditindak tegas secara hukum agar tidak terjadi lagi pada kasus-kasus berikutnya.
3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah di lingkungan Kepolisian Resort Bulukumba antara lain adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik,

peralatan penunjang yang masih minim maupun masih kentalnya budaya militer dalam lembaga kepolisian republik Indonesia

B. Implikasi penelitian

1. Hendaknya pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian resort bulukumba senantiasa mensosialisasikan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam rangka menjamin terjaganya hak-hak individu tersangka saat menjalani proses penyidikan
2. Hendaknya proses penyidikan dugaan tindak pidana pencurian ataupun pelanggaran hukum harus senantiasa berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas praduga tak bersalah sehingga tidak mengabaikan hak-hak asasi tersangka
3. Hendaknya Kepolisian Resort Bulukumba senantiasa meningkatkan SDM penyidik dengan memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Polres Bulukumba, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik dapat lebih proporsional dan professional sesuai koridor hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Bulukumba dalam angka 2004. bulukumba

Fadjar, A. Muktihi. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publising, 2005.

Djamil, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2005.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jilid I dan II Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Pidana* .; Jakarta: Pustaka Kartini, 2009.

Husain, Kadri. *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP, Tesis*, Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I., 1987.

Makarao, Muhammad Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan ,Permasalahan Dan penerapan KUHP*. Jilid I; Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Lembaga

Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Abdurrahman, Aneka *Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni 1979.

Adji, Seno Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prespektif*, Erlangga, Jakarta, 1981

Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: LaksBang, 2010.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sumber online atau internet

Santoso, Topo. *Sindrom Main Hakim Sendiri* dalam <http://www.legalitas.Org>. 11 Juni 2010

Atmasasmita, Romli. *Problem Penerpan Asas Praduga Tak Bersalah di Dunia Peradilan Indonesia*. [http:// www.legalitas.Org](http://www.legalitas.Org) Kamis 16 November 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Aneka *Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni 1979.
- Adji, Seno Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prespektif*, Erlangga, Jakarta, 1981
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Bulukumba dalam angka 2009*. Bulukumba
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Djamil, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2005.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.
- Fadjar, A. Muktihi. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publising, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan ,Permasalahan Dan penerapan KUHP*. Jilid I; Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- _____. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jilid I dan II Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Hukum Acara Pidana .*; Jakarta: Pustaka Kartini, 2009.
- Husain, Kadri. *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP, Tesis*, Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I., 1987.
- Makara, Muhammad Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: LaksBang, 2010.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sumber online atau internet:

Atmasasmita, Romli. *Problem Penerpan Asas Praduga Tak Bersalah di Dunia Peradilan Indonesia*. [http:// www.legalitas. Org](http://www.legalitas.org) kamis 16 november 2006.

Santoso, Topo. *Sindrom Main Hakim Sendiri* dalam [http://www.legalitas. Org](http://www.legalitas.org). 11 Juni 2010

